

Analisis Pakar dan Aktivis Media Sosial Terhadap Solusi Penanganan Konten Pornografi pada Kontroversi Pemblokiran X

Badie Uddin^{1*}, Akmal Firmansyah², Anisa Syavira Haryono Putri³

¹ Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul

^{2,3} Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul

¹⁻³ Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510

Corresponding author's e-mail: badie.uddin@esaunggul.ac.id^{1*}

Submitted Date : 09 Agustus 2024

Accepted Date : 16 Agustus 2024

Abstrak - Rencana pemerintah Indonesia untuk memblokir akses ke media sosial X dalam upaya menghentikan penyebaran konten pornografi telah memicu perdebatan luas. Langkah ini dinilai tidak menyelesaikan akar masalah dan berpotensi membungkam suara kritis publik. Aktivis seperti Nenden Sekar Arum berpendapat bahwa pemblokiran platform media sosial bukanlah solusi yang efektif dalam penanganan penyebaran konten pornografi di Indonesia. Nenden menyebutkan bahwa strategi pemblokiran platform digital, seperti yang pernah dilakukan terhadap Reddit dan Telegram, tidak efektif karena konten yang sama tetap banyak ditemukan meskipun platform-platform tersebut telah diblokir. Dan juga menurut Pakar Alia Yofira dari TaskForce KBGO menyatakan bahwa selama ini, ketika TaskForce KBGO menemukan penyebaran foto dan video intim non-konsensual di platform X, langkah yang diambil adalah melakukan pelaporan massal. Dengan melakukan pelaporan secara bersama-sama, diharapkan X dapat lebih cepat mengambil tindakan, baik itu menurunkan konten terkait atau menangguhkan akun penyebarannya. Namun, menurut Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dari Vaksincom, pemblokiran media sosial X dapat mengurangi akses terhadap konten pornografi hingga 50 persen, meskipun hanya merupakan solusi jangka pendek. Alfons juga menekankan perlunya memikirkan upaya jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak-anak di bawah umur, mengenai bahaya konten pornografi. Penelitian ini akan mengkaji dampak dari pemblokiran media sosial X terhadap penyebaran konten pornografi, mempertimbangkan efektivitas langkah-langkah pemblokiran sebelumnya, serta mengeksplorasi pendekatan alternatif yang dapat diambil oleh pemerintah. Dengan memahami perspektif pakar dan aktivis, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani masalah ini, yang tidak hanya berfokus pada penutupan akses tetapi juga pada peningkatan edukasi digital, pengawasan yang lebih baik, dan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Kata Kunci: Media Sosial, X, Pornografi, Pengawasan, Kebijakan Pemerintah.

Abstract - The Indonesian government's plan to block access to X social media in an effort to stop the spread of pornographic content has sparked widespread debate. The move is seen as not solving the root of the problem and has the potential to silence the public's critical voice. Activists such as Nenden Sekar Arum argue that blocking social media platforms is not an effective solution in handling the spread of pornographic content in Indonesia. Nenden mentions that the strategy of blocking digital platforms, such as what was done to Reddit and Telegram, is ineffective because the same content is still found even though these platforms have been blocked. And also according to Expert Alia Yofira from TaskForce KBGO stated that so far, when TaskForce KBGO found the spread of non-consensual intimate photos and videos on the X platform, the steps taken were to conduct mass reporting. By reporting together, it is hoped that X can take action more quickly, be it taking down related content or suspending the spreading account. However, according to Alfons Tanujaya, a cybersecurity expert from Vaksincom, X's social media blocking can reduce access to pornographic content by 50 percent, although it is only a short-term solution. Alfons also emphasized the need to think about long-term efforts to raise public awareness, especially minors, about the dangers of pornographic content. This research will examine the impact of X social media blocking on the spread of pornographic content, consider the effectiveness of previous blocking measures, and explore alternative approaches that the government could take. By understanding the perspectives of experts and activists, it is hoped that a more comprehensive and sustainable solution can be found in dealing with this issue, which focuses not only on blocking access but also on improving digital education, better monitoring, and community involvement in the prevention of online gender-based violence (GBV) cases.

Keywords: Social Media, X, Pornography, Surveillance, Government Policy.

1. Pendahuluan

Di era digital ini, media sosial telah menjadi platform utama untuk komunikasi, berbagi informasi, dan

membangun komunitas. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul pula tantangan baru terkait penyebaran konten yang tidak sesuai, termasuk konten pornografi. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, berencana memblokir akses ke media sosial X untuk menghentikan penyebaran konten pornografi[1]. Langkah ini diambil setelah media sosial tersebut, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, mengizinkan peredaran konten seksual dengan syarat-syarat tertentu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga mempertimbangkan untuk memblokir aplikasi tersebut sebagai respons terhadap penyebaran konten pornografi yang melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Langkah ini mengejutkan dunia maya dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Menurut laporan Kantor Berita Antara, Kominfo pusat sedang menyelidiki penyebaran konten dewasa yang meluas di Indonesia melalui platform X. Pemerintah telah mengirim surat kepada pihak X, meminta agar konten pornografi dihapus dari platform mereka[1]. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, menegaskan bahwa jika permintaan tersebut tidak diindahkan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas, termasuk kemungkinan memblokir akses ke aplikasi X di Indonesia[1]. Pangerapan juga menyatakan bahwa platform tersebut harus siap untuk meninggalkan pasar Indonesia jika mereka tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Tindakan pemerintah ini didasari oleh keprihatinan yang mendalam terhadap dampak negatif konten pornografi terhadap masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Konten semacam ini dianggap merusak moral dan nilai-nilai sosial, serta berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya[1]. Oleh karena itu, Kominfo berkomitmen untuk memastikan bahwa platform media sosial yang beroperasi di Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku dan berkontribusi pada pembentukan lingkungan digital yang sehat dan aman.

Namun, langkah ini juga menimbulkan kontroversi dan pertanyaan mengenai keseimbangan antara upaya menjaga moralitas publik dan kebebasan berekspresi[2]. Memblokir akses ke salah satu platform media sosial terbesar di dunia bukanlah keputusan yang mudah dan memerlukan pertimbangan yang matang. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pemblokiran ini dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat dan akses informasi yang merupakan hak dasar setiap warga negara[3].

Kebijakan pemblokiran ini telah memicu perdebatan luas di kalangan pakar dan aktivis. Banyak yang berpendapat bahwa langkah tersebut tidak menyelesaikan akar masalah dan justru akan membungkam suara kritis publik[2], dan ada juga yang berpendapat bahwa pemblokiran X dapat mengurangi akses terhadap konten pornografi walaupun hanya solusi jangka pendek[12]. Pemblokiran akses ke X dianggap sebagai solusi yang tidak efektif karena distribusi konten pornografi bisa dengan mudah berpindah ke platform lain[3]. Selain itu, pemblokiran ini juga berpotensi menutup ruang publik untuk diskusi kritis, membangun gerakan sosial, dan mengangkat berbagai kasus kekerasan seksual[4].

Para pakar dan aktivis menyarankan agar pemerintah mendorong platform seperti X untuk menyediakan mekanisme yang lebih baik dalam melaporkan dan menindaklanjuti kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), termasuk penyebaran foto dan video intim non-konsensual[5]. Kebijakan baru X yang mengizinkan konten seksual sebagai bentuk ekspresi seni dengan syarat-syarat tertentu menambah kompleksitas isu ini[3]. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan berimbang dalam menangani masalah ini[5].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemblokiran yang direncanakan pemerintah dan mengevaluasi dampaknya terhadap kebebasan berekspresi serta ruang publik yang kritis[3]. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi solusi ideal yang dapat diambil untuk menangani penyebaran konten pornografi secara lebih efektif tanpa mengorbankan hak-hak dasar pengguna media sosial. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dapat ditemukan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari konten berbahaya dan pemeliharaan kebebasan berekspresi di ruang digital.

2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan pemblokiran situs web dan platform media sosial sering kali tidak menyelesaikan akar masalah terkait penyebaran konten pornografi. Sumber dari Universitas Bangka Belitung menunjukkan bahwa pemblokiran langkah ini bisa berdampak pada kebebasan berekspresi dan berpotensi membungkam suara-suara kritis di masyarakat[6]. Selain itu, penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran membahas bagaimana pemblokiran situs media sosial seperti X dapat mempengaruhi kebebasan berekspresi dan akses informasi, yang merupakan hak asasi manusia yang fundamental[7]. Artikel ini menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara menjaga moralitas publik dan menghormati hak-hak digital warga negara.

Di sisi lain, studi dari Universitas Darma Agung menyarankan penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan untuk memfilter konten pornografi secara otomatis, yang dapat menjadi solusi lebih efektif dibandingkan pemblokiran total platform[8]. Selain itu, penelitian dari Universitas PGRI Yogyakarta menyoroti pentingnya literasi digital dan edukasi masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi penyebaran konten pornografi[9]. Edukasi ini meliputi pemahaman tentang dampak negatif konten pornografi dan cara melindungi diri dari paparan konten tersebut.

Sumber dari Universitas Islam Malang menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas untuk menangani penyebaran konten pornografi[10]. Selain itu, pendekatan rehabilitatif bagi pelaku dan korban juga perlu dipertimbangkan. Dalam konteks ini, Universitas Pattimura menggarisbawahi peran aktif masyarakat dan LSM dalam memerangi konten pornografi online[11]. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan konten yang tidak sesuai dan mendukung inisiatif literasi media dapat membantu upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman.

Menurut Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dari Vaksincom, pemblokiran media sosial X dapat mengurangi akses terhadap konten pornografi hingga 50 persen, meskipun hanya merupakan solusi jangka pendek. Tindakan ini dinilai efektif dalam mempersulit akses ke konten tersebut. Namun, Alfons menekankan perlunya upaya jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak-anak di bawah umur, mengenai bahaya konten pornografi. Pendekatan edukasi dan literasi digital sejak dini di Indonesia perlu ditingkatkan, serta penegakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran aturan konten. Alfons juga menyarankan adanya kontrol konten yang lebih ketat dengan pemerintah bekerja sama dengan platform seperti X untuk memblokir akses konten pornografi bagi pengguna di Indonesia. Menurutnya, meskipun Elon Musk memiliki pertimbangan bisnis dalam memperbolehkan konten pornografi di platformnya, ada perbedaan persepsi antar negara mengenai hal ini. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti edukasi, penegakan hukum, dan kerja sama internasional dianggap penting untuk menangani masalah konten pornografi secara komprehensif[12].

Pakar Alia Yofira dari TaskForce KBGO menyatakan bahwa selama ini, ketika TaskForce KBGO menemukan penyebaran foto dan video intim non-konsensual di platform X, langkah yang diambil adalah melakukan pelaporan massal. Dengan melakukan pelaporan secara bersama-sama, diharapkan X dapat lebih cepat mengambil tindakan, baik itu menurunkan konten terkait atau menanggihkan akun penyebarannya. Namun, jika tidak dilakukan pelaporan massal, proses penanganan kasus cenderung memakan waktu lama dan sering kali laporan ditolak oleh platform X. Alia juga menambahkan bahwa Indonesia bisa mencontoh Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa yang mengatur kebijakan mengenai "trusted flaggers" atau "pelapor terpercaya." Pelapor terpercaya ini adalah pakar yang bertugas mendeteksi peredaran konten ilegal daring dan melaporkannya kepada platform terkait, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih efektif dan efisien[19]. Pendapat pakar dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Pendapat Pakar Dari TaskForce KBGO [19]

Dalam penanganan penyebaran konten pornografi di Indonesia, pemblokiran platform media sosial bukanlah solusi yang efektif. Hal ini disampaikan oleh Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), yang menilai bahwa upaya pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum berhasil mengurangi konten pornografi. Nenden mengungkapkan bahwa strategi pemblokiran platform digital seperti yang pernah dilakukan terhadap Reddit dan Telegram tidak efektif dalam menangani masalah tersebut.



Gambar 2. Pendapat Aktivis Terkait Pemblokiran X [13]

Meskipun kedua platform tersebut diblokir dengan tujuan mengurangi konten pornografi, kenyataannya konten yang sama tetap banyak ditemukan. Menurut Nenden, pendekatan pemblokiran tidak memberikan hasil yang diharapkan dalam upaya mengurangi penyebaran konten pornografi di Indonesia[13].

Dengan mengkaji berbagai perspektif dari pakar dan aktivis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif dan efektif dalam menangani masalah penyebaran konten pornografi di era digital.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak kebijakan pemblokiran media sosial X terhadap penyebaran konten pornografi serta kebebasan berekspresi di Indonesia. Metode yang digunakan meliputi studi literatur untuk mengkaji berbagai sumber terkait kebijakan pemblokiran situs web dan platform media sosial, serta untuk menganalisis dan mengevaluasi dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan akses informasi. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan pakar keamanan siber, aktivis kebebasan berekspresi, dan perwakilan lembaga non-pemerintah dalam bidang literasi digital dan perlindungan anak, untuk mengumpulkan perspektif terhadap efektivitas pemblokiran X dan alternatif solusi yang lebih efektif. Analisis kebijakan juga dilakukan dengan menelaah kebijakan pemerintah terkait pemblokiran media sosial, membandingkannya dengan pendekatan serupa di negara lain, serta menilai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi solusi ideal yang dapat diambil untuk menangani penyebaran konten pornografi secara efektif tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan ruang publik yang kritis.

4. Hasil dan Pembahasan

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, media sosial telah menjadi platform utama untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Namun, dengan pertumbuhan ini, muncul tantangan baru terkait penyebaran konten berbahaya seperti pornografi, khususnya yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah media sosial bernama X. Untuk negara lain mungkin konten pornografi adalah hal yang biasa, tetapi di Indonesia konten dewasa seperti itu dilarang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada[12].

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengancam memblokir X, karena media sosial milik Elon Musk itu mengizinkan konten dewasa alias video porno di platform mereka. Tetapi Alfons Tanujaya, seorang pakar keamanan siber, menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Elon Musk atas penyebaran konten pornografi di platform media sosial X. Menurut Alfons, Elon Musk memiliki pertimbangan bisnis yang harus diperhatikan demi keberlangsungan perusahaan X. Ia menambahkan, "Elon kelihatannya mengetahui bahwa akses terhadap konten pornografi ternyata lebih besar daripada akses orang terhadap TikTok dan Amazon." Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Musk dalam mengelola konten di platform X didasarkan pada analisis pasar dan kebutuhan bisnisnya[12]. Pendapat pakar dapat dilihat pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Pendapat Pakar Keamanan Siber [12]

Menurut Pakar Alia Yofira dari TaskForce KBGO menyatakan bahwa selama ini, ketika TaskForce KBGO menemukan penyebaran foto dan video intim non-konsensual di platform X, langkah yang diambil adalah melakukan pelaporan massal. Dengan melakukan pelaporan secara bersama-sama, diharapkan X dapat lebih cepat mengambil tindakan, baik itu menurunkan konten terkait atau menanggihkan akun penyebarannya. Namun, jika tidak dilakukan pelaporan massal, proses penanganan kasus cenderung memakan waktu lama dan sering kali laporan ditolak oleh platform X[19].

Pemerintah Indonesia telah merencanakan langkah pemblokiran terhadap aplikasi media sosial X sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran konten pornografi[1]. Meskipun niatnya baik, langkah ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitasnya, dampaknya pada kebebasan berekspresi, serta

potensi solusi alternatif yang dapat diambil.

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait rencana pemblokiran media sosial X oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan analisis kebijakan dan wawancara dengan pakar serta aktivis, ditemukan bahwa pemblokiran media sosial X memang kurang efektif dalam mengurangi penyebaran konten pornografi. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku tidak selalu menurunkan tingkat penyebaran konten serupa[11]. Konten tersebut dapat dengan mudah berpindah ke platform lain yang tidak diblokir, sehingga langkah ini tidak menyelesaikan akar masalah dan hanya bersifat sementara[6].

Teknologi yang digunakan oleh pengguna untuk menghindari pemblokiran, seperti VPN dan proxy, juga menambah tantangan dalam menilai efektivitas kebijakan pemblokiran[2]. Meskipun pemblokiran dilakukan, konten pornografi masih dapat diakses melalui berbagai cara lain. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi canggih seperti AI dan machine learning untuk mendeteksi dan menghapus konten pornografi secara otomatis[7].

Selanjutnya, pembahasan akan berfokus pada dampak pemblokiran terhadap kebebasan berekspresi dan akses informasi. Bagaimana tindakan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kebebasan berekspresi. Apakah langkah ini akan menghambat ruang publik untuk diskusi kritis dan pembangunan gerakan sosial, termasuk upaya untuk mengangkat isu-isu penting seperti KBGO?[9].

Pakar dan aktivis yang diwawancarai sepakat bahwa solusi yang lebih efektif adalah mendorong platform media sosial untuk meningkatkan mekanisme pelaporan dan penindakan konten berbahaya. Pemerintah dan platform media sosial perlu mengembangkan kerjasama untuk menyediakan mekanisme yang lebih baik dalam melaporkan dan menindaklanjuti kasus kekerasan berbasis gender online. Selain itu, edukasi literasi digital kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan melindungi diri dari konten berbahaya[10]. Solusi alternatif yang lebih seimbang akan dipertimbangkan, seperti merekomendasikan penggunaan aplikasi lain yang dapat menggantikan fungsi X tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi[9].

Dengan mempertimbangkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif dan seimbang dalam menangani penyebaran konten pornografi di media sosial. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam yang dapat membantu pembuat kebijakan merumuskan strategi yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga melindungi dan menghormati hak-hak digital masyarakat[8]. Dalam menghadapi permasalahan ini, beberapa aplikasi alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Bluesky: Sebuah aplikasi media sosial microblogging yang memungkinkan pengguna membuat profil, berbagi pemikiran, dan berinteraksi dengan pengguna lain melalui fitur suka dan balasan[14]. Tampilan aplikasi Bluesky dapat dilihat pada Gambar 4.



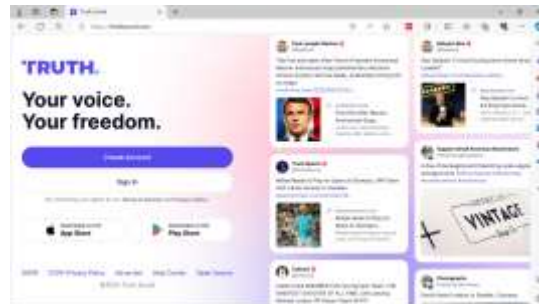
Gambar 4. Aplikasi Bluesky.

2. Instagram Threads: Platform dengan fitur dan konsep mirip X, yang memiliki keunggulan seperti mengunggah tulisan dengan jumlah karakter hingga 500 dan video berdurasi lima menit[15]. Tampilan Aplikasi Instagram Threads dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Aplikasi Instagram Threads.

3. Truth Social: Aplikasi yang mengusung konsep mirip X, memungkinkan pengguna mengunggah tulisan hingga 550 karakter, melakukan polling, dan melacak koneksi individu melalui jumlah pengikut[16]. Aplikasi Truth Social dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Aplikasi Truth Social.

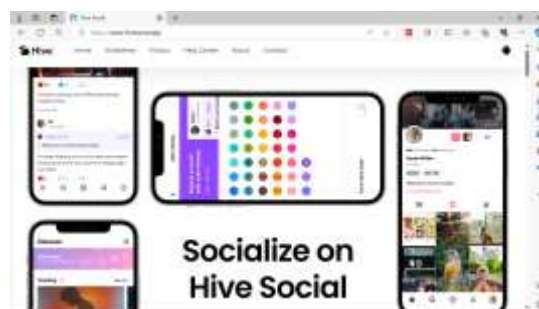
4. Mastodon: Yang menawarkan konsep desentralisasi, memungkinkan pengguna membangun jejaring mereka sendiri dan bergabung dengan server berdasarkan topik yang berbeda[17]. Tampilan Aplikasi Mastodon dapat dilihat pada Gambar 7.

5.



Gambar 7. Aplikasi Mastodon.

6. Hive Social: Aplikasi microblogging yang menampilkan unggahan berdasarkan tanggal dibuat tanpa algoritma khusus, sehingga hanya unggahan terbaru yang muncul di feed pengguna[18]. Tampilan Aplikasi Hive Social dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Aplikasi Hive Social.

Pembahasan penelitian ini menyoroti bahwa pemblokiran akses ke media sosial X hanya memberikan solusi sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah penyebaran konten pornografi. Distribusi konten pornografi dapat dengan mudah berpindah ke platform lain[3]. Langkah pemblokiran ini juga berdampak negatif pada kebebasan berekspresi dan akses informasi, menghambat ruang publik untuk diskusi kritis dan pembangunan gerakan sosial yang penting, termasuk upaya melawan kekerasan berbasis gender online[4]. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif adalah kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial[2]. Pemerintah dapat mendorong platform untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan penindakan konten berbahaya yang lebih baik, serta memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya konten pornografi dan cara melaporkannya[5]. Penelitian ini menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari konten berbahaya dan pemeliharaan kebebasan berekspresi, dengan harapan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan

berkelanjutan dalam menangani penyebaran konten pornografi di media sosial.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pakar dan aktivis pemblokiran aplikasi media sosial X oleh pemerintah Indonesia tidak efektif dalam menangani penyebaran konten pornografi. Konten tersebut dapat dengan mudah berpindah ke platform lain, sehingga pemblokiran hanya memberikan solusi jangka pendek dan sementara, dan juga tidak menyelesaikan akar masalah. Selain itu, pemblokiran ini mengancam kebebasan berekspresi dan menghambat ruang publik untuk diskusi kritis serta pembangunan gerakan sosial, termasuk upaya melawan KBGO.

Solusi yang lebih efektif adalah memperkuat regulasi yang ada dan bekerja sama dengan platform media sosial untuk meningkatkan mekanisme pelaporan dan penindakan terhadap konten berbahaya. Pemerintah juga perlu mengembangkan literasi digital di masyarakat untuk melindungi diri dari konten berbahaya dan melaporkan penyalahgunaan.

Untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari konten berbahaya dan pemeliharaan kebebasan berekspresi, alternatif seperti penggunaan aplikasi lain yang tidak melanggar aturan dianggap lebih tepat. Kebijakan harus memastikan tidak mengekang ruang publik untuk diskusi kritis dan tetap menjaga kebebasan berekspresi. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan masalah penyebaran konten pornografi dapat ditangani dengan lebih baik, menjaga keamanan digital dan kebebasan berekspresi.

Daftar Pustaka

- [1] "Pemerintah Lindungi Anak dari Paparan Konten Pornografi." Accessed: Jul. 16, 2024. [Online]. Available: https://www.kominfo.go.id/content/detail/24185/pemerintah-lindungi-anak-dari-paparan-konten-pornografi/0/sorotan_media
- [2] A. Baihaqi and I. Prasetyo, "Pemblokiran Jelas Tidak Efektif." Accessed: Jul. 16, 2024. [Online]. Available: <https://kolom.solopos.com/pemblokiran-jelas-tidak-efektif-1947772>
- [3] D. Sucianingsih, "TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBLOKIRAN MEDIA YANG BERMUATAN NEGATIF."
- [4] E. Kusuma and N. S. Arum, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan berbasis Gender Online".
- [5] dr. F. R. Makarim, "Ini Cara Menyikapi KBGO atau Kekerasan Berbasis Gender Online." Accessed: Jul. 16, 2024. [Online]. Available: <https://www.halodoc.com/artikel/ini-cara-menyikapi-kbgo-atau-kekerasan-berbasis-gender-online>
- [6] M. H. Rahman, "Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?"
- [7] S. Julianja, "Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Padjajaran Law Review*, vol. 6, 2018, [Online]. Available: <https://apjii.or.id/survei2017>,
- [8] O. : Gomgom, T. P. Siregar, I. Purnanto, and S. Sihite, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," 2021.
- [9] S. Anna, A. P. Utama, B. Setiawan, P. Widodo, H. J. R. Saragih, and A. Sukendro, "Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19".
- [10] B. Arianto, "Retract: Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia".
- [11] E. Z. Leasa, "Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *SASI*, vol. 24, no. 2, p. 168, Feb. 2019, doi: 10.47268/sasi.v24i2.131.
- [12] "Kata Pakar, Pemblokiran Medsos X Kurangi Akses Terhadap Konten Pornografi." Accessed: Jul. 16, 2024. [Online]. Available: <https://dnaberita.com/kata-pakar-pemblokiran-medsos-x-kurangi-akses-terhadap-konten-pornografi/>
- [13] N. R. Aditya and F. C. Farisa, "Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi." Accessed: Jul. 16, 2024. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/16/20041951/safenet-nilai-pemblokiran-x-twitter-bukan-solusi-hentikan-konten-pornografi>
- [14] "Blue Sky," 2023. Accessed: Jul. 16, 2024. [Online]. Available: <https://bsky.social/about/>
- [15] "About Threads and the fediverse." Accessed: Jul. 16, 2024. [Online]. Available: <https://help.instagram.com/169559812696339>
- [16] "Truth Social." Accessed: Jul. 16, 2024. [Online]. Available: <https://truthsocial.com/>
- [17] "Mastodon." Accessed: Jul. 16, 2024. [Online]. Available: <https://joinmastodon.org/>
- [18] "Hive Social." Accessed: Jul. 16, 2024. [Online]. Available: <https://joinmastodon.org/>
- [19] Naviri. (2024, Juni 1). "Pakar dan aktivis pertanyakan rencana blokir X terkait konten pornografi."